

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk sumber daya alam yang terdapat di darat, udara, dan air. Jika dikelola secara optimal, sumber daya ini dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Pengelolaan yang tepat dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dapat menghasilkan manfaat yang signifikan. Saat ini, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi wilayah guna meningkatkan pendapatan daerah.

Sektor pariwisata menjadi salah satu bidang strategis di berbagai daerah karena diyakini mampu memberikan manfaat ekonomi dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat. Potensi pariwisata yang dimiliki setiap daerah, termasuk Pacitan, menjadi peluang besar untuk mengembangkan sektor ini, baik dari segi peningkatan jumlah wisatawan maupun kualitas layanan yang diberikan. Dengan demikian, pariwisata diharapkan terus berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan daerah di masa mendatang. Oleh sebab itu, pengembangan sektor pariwisata perlu dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan agar jumlah wisatawan semakin meningkat, serta wisatawan dapat memperoleh pengalaman yang berkesan melalui layanan pariwisata yang tersedia.

Pengembangan pariwisata pedesaan diharapkan mampu menjadi contoh penerapan model pariwisata berkelanjutan yang selaras dengan kebijakan pemerintah dalam sektor ini. Konsep pariwisata berkelanjutan sendiri berfokus pada pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa depan. Kabupaten Pacitan, yang terletak di Jawa Timur, dikenal sebagai daerah dengan banyak potensi wisata pantai. Karena itu, Pacitan sering dijuluki "Paradise of Java." Selain wisata pantai, Pacitan juga menawarkan berbagai objek wisata alam dan sejarah.

Beberapa destinasi wisata terkenal di Pacitan meliputi Pantai Pangasan di Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung; Pantai Wawaran di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung; Pantai Kaliuluh di Desa Klesem, Kecamatan Kebonagung; dan Pantai Tawang di Desa Katipugal, Kecamatan Kebonagung. Selain itu, terdapat Pantai Klayar di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo; Pantai Srau di Desa Candi; Pantai Watu Karung di Desa Watu Karung; Sungai Maron di Desa Dersono; Goa Gong di Desa Bomo, Kecamatan Punung; serta Museum Song Terus di Desa Wareng, Kecamatan Punung. Destinasi lainnya yang dijuluki "Raja Ampatnya Pacitan" adalah Pantai Kasap, yang terletak di Desa Watu Karung, Kecamatan Pringkuku.

Sebagai salah satu desa wisata, Desa Kalipelus dengan Pantai Pangasan telah berhasil meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Transformasi ini terlihat dari perubahan pola hidup masyarakat yang semula tradisional kini mulai beradaptasi menuju gaya hidup modern. Pengelolaan wisata Pantai Pangasan dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020. Selain itu, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah desa perlu diatur dalam peraturan desa.

Salah satu perubahan signifikan adalah perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata. Jalan yang sebelumnya rusak dan penuh bebatuan kini sebagian besar telah diaspal, sehingga mempermudah akses wisatawan yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Selain itu, fasilitas pendukung seperti area parkir untuk mobil dan motor juga telah disediakan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung.

Program pengembangan destinasi wisata Pantai Pangasan di Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, merupakan bagian dari visi dan misi Kepala Desa Kalipelus yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kalipelus. RPJM Desa ini

mencakup aspirasi masyarakat terkait berbagai layanan publik yang kemudian dikaji dan dianalisis sebelum dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP). Penyusunan RKP membutuhkan waktu satu tahun sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah ditetapkan. Pengelolaan pendapatan desa diawasi melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), di mana kepala desa bertanggung jawab mengelola anggaran desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyusunan anggaran untuk program pengembangan wisata Pantai Pangasan, dibuat proposal yang diajukan kepada BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Daerah).

Pemerintah Desa Kalipelus telah berupaya meningkatkan pembangunan dengan menetapkan pengembangan wisata Pantai Pangasan dalam Peraturan Desa Kalipelus Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Desa. Kebijakan pemerintah desa yang tegas dalam pengelolaan pembangunan wisata Pantai Pangasan telah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan di Desa Kalipelus. Dengan pembangunan pariwisata yang memiliki karakteristik unik, desa ini telah mencapai keberhasilan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Desa juga mendirikan usaha-usaha baru untuk memfasilitasi, melayani, dan memberikan bantuan bagi anggota maupun masyarakat Desa Kali pelus, serta menjadi sumber Pendapatan Asli Desa. Pada tahun 2023 dana tersebut digunakan untuk mengembangkan wisata yang ada di desa Kalipelus yaitu pantai pangasan dalam pembangunan wisata tersebut yang juga dibantu oleh pihak TNI dalam membangun jalan sebagai akses. Selanjutnya setelah pembangunan wisata sudah jadi dan akhirnya viral di sosial media pihak pemerintah Kabupaten Pacitan menunjuk desa Kalipelus untuk mewakili Kabupaten Pacitan dalam lomba penganugerahan wisata nusantara yang diselenggarakan di wilayah Lombok Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023. Pemerintah Desa Kali pelus mendapatkan penghargaan meraih nominasi wisata nusantara tingkat nasional. Selain itu, Pemerintahan Desa

Kali pelus menjadi salah satu desa yang berjalan dengan baik di antara desa-desa di Kecamatan Kebonagung.

Kemudahan akses menuju lokasi wisata menjadi salah satu faktor penting yang menambah nilai strategis, selain potensi alam yang sudah dimiliki oleh desa wisata tersebut. Keberhasilan pengembangan destinasi wisata tidak dapat dipisahkan dari peran aktif lembaga atau institusi lokal yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Pemerintah Desa Kalipelus memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi wisatanya melalui berbagai strategi, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan promosi pariwisata berkelanjutan. Upaya peningkatan infrastruktur meliputi perbaikan akses jalan, pembangunan fasilitas umum seperti toilet dan tempat istirahat, serta penyediaan area parkir yang memadai untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Pelatihan sumber daya manusia meliputi pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan pemandu wisata, pengelolaan homstey, dan pelatihan kerajinan tangan atau kuliner khas desa. Promosi pariwisata dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial dan partisipasi dalam pameran pariwisata regional dan nasional. Selain itu, pengembangan desa wisata ini harus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal agar dapat menarik wisatawan dalam jangka panjang. Hal ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah Desa Kali Pelus untuk mengembangkan wisata pantai pangasan.

Cara pemerintah Desa Kalipelus membranding tentang desa wisata, awalnya Desa Kalipelus itu dibidang masih jauh atau masih nol tentang wisata namun setelah kita berupaya berusaha antara perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kita membentuk pokdarwis. Setelah itu kita bangun bersama-sama dengan berbagai pihak tersebut. Maka dari itu berkembanglah pantai pangasan. Pihak pemerintah desa mengumpulkan tokoh masyarakat dan sebagainya. Karena semuanya sudah bertekad bagaimana desa Kalipelus menjadi desa wisata. Peran Kepala Desa Kalipelus dalam keberhasilan meraih nominasi wisata Nusantara, yang dibantu dengan adanya pokdarwis. Wisata Nusantara itu sangat luas, yang

dinilai tidak hanya lokasi bahkan administrasi dan beberapa kaitannya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh panitia LDWN 2023 yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Desa dan PDDT kepada Kepala Desa Kalipelus, karena Desa Kalipelus masuk dalam 15 besar Lomba Desa Wisata Nusantara yang menjadikan perwakilan provinsi Jawa Timur pada tahun 2023.

Destinasi wisata Pantai Pangasan Desa Kalipelus memiliki potensi wisata yang sangat bagus, seperti pemandangan alam yang unik dan juga menetapkan konsep alam yang tidak dirubah. Hal ini dapat membantu mengungkap potensi tersebut dan mengembangkan wisata yang berkelanjutan. Kini pemerintah Desa terus mengalokasikan dana pembangunan dari tahun pertahun yang dimulai sejak tahun 2020. Pembangunan destinasi wisata di Pantai Pangasan Desa Kalipelus dapat berdampak positif pada perekonomian lokal, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata.

Sebelum Pantai Pangasan dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan, Desa Kalipelus merupakan desa yang kurang dikenal, dengan infrastruktur yang minim dan perekonomian masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian dan nelayan tradisional. Tingkat pendapatan masyarakat tergolong rendah. Keterbatasan akses jalan menuju desa juga menjadi kendala utama, sehingga potensi wisata yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa juga cenderung rendah karena kurangnya program yang memberdayakan penduduk lokal. Namun, pasca pengembangan Pantai Pangasan sebagai obyek wisata unggulan, perubahan signifikan mulai terlihat di berbagai sektor. Aksesibilitas ke desa meningkat drastis setelah adanya pembangunan jalan. Infrastruktur desa, seperti fasilitas umum (toilet, tempat parkir, dan tempat istirahat), kini telah tersedia dan memadai untuk mendukung aktivitas wisata. Tingkat kunjungan wisatawan terus meningkat per bulan di tahun 2023, terutama

setelah pantai tersebut viral di media sosial.

Dari segi ekonomi, dampak pengembangan wisata ini sangat signifikan. Pendapatan per keluarga di desa meningkat berkat partisipasi masyarakat dalam berbagai usaha yang mendukung pariwisata, seperti pengelolaan homestay, warung makan, jasa pemandu wisata, hingga pembuatan dan penjualan kerajinan tangan khas Desa Kalipelus. Desa juga memperoleh Pendapatan Asli Desa (PAD) pada tahun 2023 dari hasil pengelolaan wisata dan usaha-usaha lokal yang didirikan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam program desa juga meningkat, dengan banyaknya pelatihan dan kegiatan pemberdayaan yang melibatkan warga lokal.

Keberhasilan Desa Kalipelus juga terlihat dari meningkatnya pengakuan di tingkat nasional. Penghargaan nominasi Lomba Desa Wisata Nusantara 2023 menjadi simbol transformasi desa yang dulunya terpencil menjadi salah satu desa wisata terbaik di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik dan kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan institusi terkait, potensi desa dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pembangunan destinasi wisata merupakan proses dinamis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mencapai nilai yang lebih tinggi melalui penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, serta masukan dari pelaksanaan rencana sebelumnya. Proses ini menjadi landasan utama bagi kebijakan dan misi yang perlu terus ditingkatkan. Dalam berbagai bidang atau kegiatan, pengembangan menjadi elemen kunci untuk meningkatkan nilai dan memberikan dampak positif, baik dari segi ekonomi maupun sosial, termasuk dalam sektor pariwisata.(Renold, 2024).

Pembangunan destinasi wisata merupakan proses dinamis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mencapai nilai yang lebih tinggi melalui penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, serta masukan dari pelaksanaan rencana sebelumnya. Proses ini menjadi landasan utama bagi kebijakan dan misi yang perlu terus ditingkatkan. Dalam berbagai bidang atau kegiatan, pengembangan menjadi elemen kunci untuk meningkatkan nilai dan memberikan dampak positif, baik dari segi ekonomi maupun sosial, termasuk dalam sektor pariwisata.(Renold, 2024).

Desa memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. Saat ini, sudah banyak desa yang berhasil mengubah dirinya menjadi desa wisata. Contohnya adalah Desa Pujon Kidul di Malang, yang mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp1.200.000.000 per tahun. Selain itu, Desa Sekapuk di Gresik juga menjadi desa wisata yang sukses berkat peran aktif BUMDes dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia yang tersedia. Ada juga Desa Wisata Cibuntu yang telah meraih penghargaan internasional sebagai salah satu desa wisata yang mengesankan di tingkat global. Namun, tidak semua desa dapat mencapai status desa wisata, karena ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui untuk mewujudkannya. (Alfan Hakim, 2022).

Pada penelitian ini, disajikan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mana memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Dari penelitian - penelitian terdahulu disimpulkan mengenai perbedaan implementasi kebijakan tata Kelola Pantai Pangasan di Desa KaliPelus.

Dengan mengidentifikasi penelitian terdahulu diharapkan peneliti dapat memperkuat alasan mengapa membahas permasalahan ini. Penelitian pertama dilakukan oleh I Ketut Mei Ardika dan dipublikasikan dalam jurnal berjudul "*Implementasi Kebijakan Manajemen Pariwisata di Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.*" Untuk mengoptimalkan potensi seluruh wilayah, pelaksanaan kebijakan dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, menjadi prioritas utama. Mengingat ketergantungan wilayah ini pada sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali perlu memusatkan kebijakan pembangunannya pada pengembangan sektor ini, yang menjadi pilar utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Bali. Selain pariwisata, sektor pertanian dan perkebunan juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor pembangunan paling signifikan di Bali, memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Aktivitas pariwisata tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan utama bagi Bali, tetapi juga menarik perhatian masyarakat lokal dan wisatawan mancanegara yang menghargai keindahan alam, kualitas lingkungan, serta nilai-nilai moral dan sosial budaya yang dimilikinya. Namun demikian, sektor pariwisata juga menghadirkan tantangan, seperti alih fungsi lahan dalam skala besar dan perubahan kawasan sejarah serta budaya unik menjadi pusat ekonomi berbasis pariwisata. Dalam konteks pengelolaan pariwisata di Desa Umeanyar, terdapat sinergi antara pemerintah desa administratif dan desa adat. Keduanya memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata di wilayah tersebut. (Ardika & Agustana, 2021).

Kajian kedua berasal dari makalah Budi Hasanah yang berjudul "*Tata Kelola Desa Wisata Berpusat pada Masyarakat Sukaratu Berbasis Soumiyaratat.*" Penelitian ini menggunakan teori Natori untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Desa Wisata Sukaratu di Kecamatan Cikeusar, Provinsi Serang dilakukan dengan pendekatan yang terarah

dalam pengembangan pariwisata. Teori ini menyatakan bahwa indikator pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mencakup pembentukan hubungan harmonis antara masyarakat lokal, sumber daya alam dan budaya, serta wisatawan, yang mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) Memperhatikan keinginan masyarakat dan memajukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat; (2) Melestarikan lingkungan fisik masyarakat serta mendorong dan menciptakan keharmonisan antara alam, budaya, dan masyarakat; (3) Menjamin keberlanjutan ekonomi dengan distribusi hasil pembangunan yang adil dan merata; (4) Membangun sistem yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti sistem berbagi informasi; dan (5) Mengutamakan kenyamanan dan kepuasan wisatawan melalui penyediaan informasi yang efektif, efisien, dan tepat guna serta peningkatan pelayanan.

Setiap desa memiliki karakteristiknya masing-masing, termasuk Desa Sukaratu di Kecamatan Cikeusar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Program PNPM pertama kali diterapkan di Desa Sukaratu sebagai model pembangunan ekonomi berbasis budaya. Pada tahun 2018, dilakukan pemetaan potensi desa dengan melibatkan staf perangkat desa dan Dinas Pariwisata Kabupaten Serang dan Provinsi Banten. Sekitar setahun kemudian, terbentuk destinasi wisata baru yang diberi nama Taman Pesona. Keberhasilan ini sangat terkait dengan keterlibatan masyarakat. Namun, untuk memastikan keberhasilan pengembangan pariwisata desa secara berkelanjutan, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat demi pencapaian jangka panjang. (Hasanah, 2019).

Penelitian ketiga mengacu pada makalah berjudul “*Manajemen Desa Wisata Berbasis CHSE di Desa Bakas, Kabupaten Klungkung*” oleh Hanugerah Cristiano Riestiandre. Makalah ini mengungkapkan bahwa perkembangan Desa Kedongan pada tahun 2000-an beriringan dengan pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata di Bali. Kawasan Jimbaran juga menjadi pusat wisata kuliner, khususnya ikan bakar yang sangat diminati oleh wisatawan yang ingin menikmati makan malam sambil menyaksikan matahari terbenam di pantai. Fenomena ini menyebabkan Desa

Kedonganan berkembang menjadi destinasi wisata dengan menawarkan hidangan ikan bakar yang serupa. Kehadiran warung makan dan kafe di desa ini menandai awal berkembangnya aktivitas pariwisata. Namun, kurangnya pengelolaan yang terorganisir menyebabkan dampak negatif. Pada tahun 2007, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung, pengelolaan kawasan Pantai Kedonganan mulai diterapkan dengan konsep berbasis kearifan lokal Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan masyarakat. Pengelolaan wilayah Pesisir Kedonganan kemudian diserahkan kepada Badan Pengelola Wilayah Pesisir Kedonganan (BPKP2K) dengan pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. Sejak saat itu, sektor pariwisata berkembang pesat, tidak hanya menawarkan kuliner, tetapi juga berbagai aktivitas yang diselenggarakan oleh desa, seperti berkuda, tur perahu saat matahari terbenam, dan wisata hutan mangrove. Pengembangan Desa Kedonganan berlandaskan prinsip bahwa pariwisata adalah milik rakyat, dikelola oleh rakyat, dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, menjadikan pariwisata sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, masyarakat desa memahami manfaat pariwisata dalam pengembangan desa, mengenal konsep desa wisata, dan mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keberlanjutan desa mereka. Hal ini tercermin dalam operasional desa wisata, termasuk pemasaran produk, promosi, dan pelayanan yang ditujukan kepada wisatawan. (Liestiadre et al., 2021).

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Doni Setiawan berjudul *“Implementasi Kebijakan Ekonomi Desa dalam Rangka Peningkatan Potensi Pariwisata untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal (Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung)”*. Berdasarkan penelitian ini, pengembangan usaha desa dengan memperhatikan keberlanjutan dapat mengoptimalkan potensi pariwisata di daerah tersebut. Potensi pariwisata dapat dimaksimalkan melalui kebijakan yang diterapkan serta pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDesa. Sektor

pariwisata dapat difokuskan untuk mengembangkan potensi wisata dan menjaga keberlanjutan destinasi yang ada. Unit usaha BUMDesa dapat menjalankan koperasi atau usaha lainnya, seperti desa wisata yang mengelola berbagai jenis kegiatan usaha untuk kelompok masyarakat. Dengan adanya dukungan Dana Desa yang difokuskan pada pendirian dan pengelolaan BUMDes, hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menggali potensi wisata, menjaga daya tarik wisata, dan meningkatkan nilai ekonomi dari kegiatan yang telah berjalan. Melalui penerapan langkah-langkah dan inisiatif strategis, seperti memanfaatkan sumber daya desa, BUMDesa diharapkan dapat memperkuat potensi pariwisata dan memberikan manfaat serta dukungan yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Penguatan sektor pembangunan yang berhasil, terutama pariwisata yang terintegrasi dengan baik, pada akhirnya akan berkontribusi pada ketahanan ekonomi lokal dan, secara lebih luas, ketahanan ekonomi negara. (Setiawan et al., 2018).

Penelitian kelima mengacu pada makalah Agung Saputra yang berjudul "Analisis Kebijakan Pariwisata pada Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Samosir". Kebijakan pariwisata ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan pariwisata di Danau Toba dengan pengelolaan destinasi wisata yang tepat, disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Pengembangan pariwisata juga harus dilihat dari perspektif ekonomi dalam kerangka kebijakan pembangunan, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian serta pendapatan masyarakat setempat. Untuk itu, dalam mengelola destinasi wisata yang langsung dikelola oleh pemerintah daerah, pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kemajuan pariwisata sangat penting. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir diatur melalui Keputusan Gubernur Kabupaten Samosir Nomor 474 Tahun 2017 yang menetapkan standar dan klasifikasi destinasi wisata di wilayah tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata dengan mengelompokkan daya tarik wisata berdasarkan kriteria dan klasifikasi yang telah ditentukan. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari

implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan Daerah Provinsi Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021. Kebijakan ini memberikan pedoman dalam pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Samosir. (Saputra & Ali, 2020).

Studi keenam mengacu pada makalah Dodi Setiawan berjudul "Implementasi Kebijakan Kota Batu untuk Mewujudkan Kota Wisata yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan" , yang mengkaji upaya Kota Batu dalam mencapai tujuan tersebut. Penerapan kebijakan ini dinilai kurang optimal karena minimnya informasi dan komunikasi selama fase implementasi. Sebagai contoh, masyarakat tidak diberi tahu siapa pemenang lelang hingga proses lelang selesai, dan baru diinformasikan melalui poster dan tanda yang dipasang oleh pemenang setelah pembangunan fasilitas pariwisata dimulai. Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, ada tiga dimensi utama yang belum tercapai: peningkatan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pertumbuhan sektor konstruksi yang pesat di Kota Batu telah mengarahkan lebih banyak investasi ekonomi untuk mendukung pembangunan perkotaan, sementara kota ini juga semakin berkembang sebagai tujuan wisata. Perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu semakin menarik minat investor dan membuka peluang bisnis yang menjanjikan. Namun, perkembangan pariwisata yang cepat ini juga membawa dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, terutama karena kurangnya kebijakan dan tindakan tegas dari pemerintah setempat untuk melindungi lingkungan regulasi yang membatasi pembangunan pariwisata diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan sektor pariwisata dan investasi baru tidak memberikan dampak negatif. Pembangunan pariwisata seharusnya selaras dengan lingkungan, sehingga dampak positifnya dapat dimaksimalkan, sementara dampak negatifnya diminimalkan (Obot & Setyawan, 2017).

Peneletian terdahulu tentang destinasi wisata umumnya fokus pada pengembangan, dampak ekonomi dan sosial serta partisipasi masyarakat. Contohnya pada beberapa penelitian diatas. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian anda berjudul —Implementasi Kebijakan Tata Kelola Wisata Pantai Pangasan Di Desa Kalipelus — juga karena belum ada yang meneliti tentang proses pengelolaan destinasi wisata tersebut.

Pada penelitian di Desa Kalipelus terdapat permasalahan tentang pengelolaan lahan hutan milik desa yang belum maksimal disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghijauan masih rendah. Masyarakat kurang memahami betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan untuk keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup mereka. Kedua, penebangan hutan yang tidak terkendali semakin memperburuk kondisi ini, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Selain itu, pengelolaan wisata desa juga belum mencapai potensi maksimalnya. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah ini antara lain adalah ketiadaan tata kelola wisata yang jelas. Tanpa adanya struktur dan perencanaan yang baik, pengelolaan wisata desa menjadi tidak terarah dan kurang efektif. Kemudian, keterbatasan anggaran yang dialokasikan dari APBDESA juga menjadi kendala besar. Dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk melakukan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas wisata yang memadai. Terakhir, akses jalan yang belum sempurna turut menjadi hambatan. Infrastruktur jalan yang buruk membuat wisatawan enggan untuk berkunjung, sehingga mengurangi potensi pendapatan desa dari sektor pariwisata. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi deforestasi, memperbaiki pengelolaan pariwisata, menyediakan dana yang cukup, serta memperbaiki infrastruktur jalan, berbagai masalah tersebut dapat diselesaikan dan pengelolaan lahan hutan serta jumlah desa wisata dapat ditingkatkan. Diharapkan upaya ini akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan wisata desa Pantai Pangasan oleh pemerintahan Desa Kalipelus ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan juga mengetahui implementasi kebijakan pembangunan wisata desa pantai pangasan di Desa Kali Pelus Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam meraih nominasi Wisata Nusantara.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini memberikan dua jenis manfaat yakni manfaat praktis dan manfaat teoritis.

### **a. Manfaat Praktis**

- i. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh serta menyelesaikan studi akhir pada mata kuliah Sempro Program Penelitian Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2024.
- ii. Penelitian ini juga akan menjadi referensi bagi pembaca yang berencana melakukan penelitian serupa di masa depan dan memberikan wawasan tentang strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk mendukung kesuksesan desa wisata yang direkomendasikan sebagai destinasi wisata di Indonesia.

### **b. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca yang sedang meneliti atau tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang strategi-strategi sukses yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Kaliperus dalam rangka meraih penetapan Kecamatan Kebonagung sebagai destinasi wisata di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan penelitian yang bermanfaat bagi Kabupaten Pacitan.

## **E. PENEGASAN ISTILAH**

### **a. Kebijakan**

Kebijakan pariwisata adalah serangkaian prinsip, pedoman, dan peraturan yang dirancang oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pengembangan, pemasaran, regulasi, dan pengawasan kegiatan pariwisata. Tujuan utama dari kebijakan pariwisata adalah untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dihasilkan oleh sektor pariwisata, sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

### **b. Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi seluruh wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan berkontribusi pada terciptanya ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. (Sugiman, 2018).

### **c. Pariwisata**

Pariwisata adalah sektor industri yang terdiri dari berbagai usaha yang saling berhubungan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan wisatawan dalam aktivitas pariwisata. Usaha pariwisata sendiri adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan serta mendukung kegiatan pariwisata. Pariwisata juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik bagi destinasi yang dikunjungi maupun bagi negara asal wisatawan. Hal ini mencakup penciptaan lapangan kerja, pendapatan dari pajak, serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Namun, pariwisata juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, kepadatan penduduk lokal, dan perubahan

budaya setempat, sehingga perlu dikelola dengan baik untuk memastikan keberlanjutannya (Anggarini, 2021).

## **F. LANDASAN TEORI**

### **a. Definisi Kebijakan Publik**

#### **1. Kebijakan**

Menurut Carl Friedrich dalam Yosua T. Panggulu, (2013) politik adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu untuk menentukan tujuan dan menemukan cara mengatasi hambatan yang ada agar tujuan tersebut tercapai. Politik adalah proses pemecahan masalah, di mana tindakan diambil untuk mencapai atau memperoleh tujuan yang diinginkan. Teori ini mempelajari bagaimana regulasi yang efektif dan tata kelola yang baik dapat mendorong pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan industri pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan.

Nugroho (2023) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sejatinya adalah alat untuk memastikan kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Implementasi mencakup ruang lingkup di mana arah yang telah direncanakan dapat memberikan hasil yang memadai. Meter dan Horn dalam (Subarsono, 2012) mengusulkan sebuah model sistem kebijakan yang mencakup beberapa komponen penting yang harus selalu ada agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Ada enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni:

#### **1. Kriteria dan Tujuan Kebijakan**

Menyajikan penjelasan menyeluruh mengenai

tujuan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen peraturan, serta menetapkan kriteria yang jelas dan terperinci untuk menilai kinerja program.

## 2. Sumber Daya

Sebuah kebijakan tidak hanya mencakup tujuan yang telah distandarisasi, tetapi juga memerlukan sumber daya yang cukup untuk memastikan kelancaran implementasi. Sumber daya ini bisa berupa pendanaan atau insentif lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.

## 3. Karakteristik Badan Pelaksana

Merujuk pada aspek-aspek organisasi yang mempengaruhi keberhasilan program, seperti kapasitas dan jumlah staf, dukungan dari lembaga legislatif dan administratif, kekuatan organisasi, serta tingkat keterbukaan komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal dan pembuat kebijakan.

## 4. Komunikasi dan Aktivitas Implementasi Antar-Organisasi

Proses implementasi membutuhkan prosedur dan mekanisme kelembagaan yang mengatur alur komunikasi antar organisasi, mulai dari tingkat tertinggi hingga yang terendah.

## 5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal terhadap pelaksanaan program, termasuk sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, opini publik, dukungan dari elit, serta peran kelompok kepentingan dan sektor swasta dalam mendukung keberhasilan program.

## 6. Sikap Pelaksana

Persepsi dan sikap para pelaksana dalam organisasi yang menjalankan program, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, loyalitas, dan kepentingan individu.

Menurut Nugroho, (2023:158) implementasi kebijakan sejatinya adalah sarana untuk mencapai tujuan kebijakan tanpa melebihi atau gagal mencapainya. Nugroho, (2023:158) juga mengemukakan bahwa perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat memiliki dampak besar terhadap hasil yang positif. Sekitar 60 persen dari keberhasilan kebijakan berkontribusi pada konsep berkelanjutan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan, sementara 40 persen sisanya bergantung pada implementasi yang konsisten dengan konsep tersebut.

Teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Carl E. Van Horn, yang dikutip dalam buku Analisis Kebijakan Publik (Subarsono, 2012) mencakup enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi:

- c. Standar dan Tujuan Politik: Standar dan tujuan politik harus jelas dan terukur agar dapat dicapai. Ketika standar dan tujuan tidak jelas, kemungkinan kesalahpahaman dan konflik antara pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya akan meningkat.
- d. Sumber Daya: Implementasi kebijakan memerlukan dukungan dari sumber daya manusia dan non-manusia yang cukup untuk memastikan kelancaran pelaksanaan.
- e. Hubungan Antar-Organisasi: Banyak program membutuhkan dukungan dan koordinasi antar lembaga untuk dapat dilaksanakan dengan sukses.

Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama antar lembaga sangat diperlukan.

- f. Karakteristik Agen Implementasi: Karakteristik agen implementasi mencakup struktur birokrasi, norma, dan hubungan dalam birokrasi yang mempengaruhi pelaksanaan program.
- g. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik: Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok kepentingan mendukung kebijakan tersebut, serta karakteristik partisipan, apakah mereka mendukung atau menolak kebijakan tersebut. Selain itu, opini publik mengenai kebijakan dan dukungan dari elit lokal dan politik juga mempengaruhi.
- h. Sikap Pelaksana: Sikap pelaksana terdiri dari tiga komponen penting: (a) reaksi pelaksana terhadap kebijakan, yang mempengaruhi kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan tersebut, (b) pengetahuan atau pemahaman politik, dan (c) kecenderungan kekuasaan pelaksana, yang mencerminkan nilai-nilai pribadi pelaksana.

#### **b. Publik**

Istilah "publik" dalam kebijakan publik menjadi lebih jelas jika dibandingkan dengan istilah "swasta." Penggunaan kedua istilah ini telah ada sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Dalam budaya Yunani kuno, kata "koinion" digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang bersifat umum, sedangkan kata "idion" merujuk pada hal-hal yang bersifat pribadi. Sementara itu, di Roma kuno, urusan publik dikenal sebagai "res-publica," dan urusan pribadi disebut "res-priva.", Gobetti (2007) menjelaskan, berdasarkan catatan sejarah Romawi, istilah "pribadi" merujuk pada individu atau perorangan,

sedangkan istilah "publik" mengacu pada masyarakat atau negara. Dalam analisisnya, Gobetti menggambarkan bahwa John Locke adalah seorang filsuf politik yang lebih memprioritaskan kepentingan individu, sedangkan Thomas Hobbes lebih menekankan pentingnya isu-isu publik atau kenegaraan. Saxon House, seperti yang dikutip Parsons (2005), juga mengadopsi pendekatan serupa dalam membedakan istilah "publik" dan "swasta."

| Publik     | Privat                |
|------------|-----------------------|
| Polis      | Rumah tangga          |
| Kebebasan  | Keharusan (necessity) |
| Pria       | Wanita                |
| Kesetaraan | Kesenjangan           |
| Keabadian  | Kesementaraan         |
| Terbuka    | Tertutup              |

Dalam kehidupan sehari-hari, membedakan antara ruang publik dan privat seringkali menjadi tantangan. Saxonhouse (dalam Parsons, 2005) menyatakan bahwa batasan antara kedua ruang ini tidaklah sepenuhnya jelas. Hubungan antara ruang publik dan privat sangat kompleks serta saling terhubung. Tidak jarang terjadi benturan antara kepentingan umum dan pribadi. Salah satu pendekatan untuk mengatasi konflik ini adalah dengan mengadopsi konsep ekonomi pasar. Habermas mengungkapkan bahwa di Inggris pada awal abad ke-19, ruang publik berkembang sebagai hasil pemisahan antara otoritas publik dan kehidupan pribadi.

Parsons (2005) menjelaskan bahwa mekanisme pasar dapat dimanfaatkan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan umum. Kebebasan individu dalam membuat pilihan tidak hanya dapat memenuhi

kebutuhan pribadi tetapi juga mendukung penyediaan barang publik dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, peran negara dan politik adalah memastikan terciptanya kondisi yang memungkinkan kepentingan publik terwujud tanpa pengaturan yang berlebihan terhadap urusan privat. Kepentingan umum dapat lebih efektif terjaga ketika negara menjamin kebebasan pasar dan ekonomi tanpa terlalu banyak campur tangan. Namun demikian, peran pemerintah tetap diperlukan untuk menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan keseimbangan alami yang muncul dari interaksi kepentingan individu. Dalam konteks peran dan posisi negara, sektor publik dapat dibedakan dari sektor privat.

Barbour, sebagaimana dikutip oleh Parsons (2005) dari Maisey, menguraikan sepuluh karakteristik utama sektor publik sebagai berikut:

1. Sektor publik cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, dengan fungsi yang sering kali tidak sepenuhnya jelas.
2. Sektor publik menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan keputusan.
3. Tenaga kerja di sektor publik lebih beragam, dengan motivasi yang sangat bervariasi.
4. Sektor publik menekankan keberlanjutan dalam menyediakan peluang dan pengembangan keterampilan.
5. Fokus sektor publik terletak pada penanganan kegagalan pasar.
6. Aktivitas sektor publik sering kali memiliki nilai simbolis yang signifikan.
7. Standar akuntabilitas dan legalitas yang lebih ketat diperlukan di sektor publik.

8. Sektor publik lebih terlibat dalam menangani isu-isu keadilan dan kesetaraan.
9. Sektor publik berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
10. Tingkat dukungan publik yang lebih tinggi dibandingkan sektor swasta harus dipertahankan oleh sektor publik.

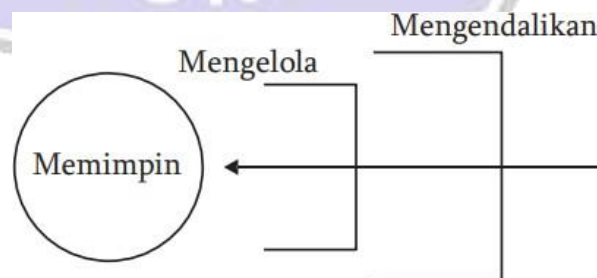
Sektor publik tidak selalu berorientasi pada keuntungan finansial. Meski dalam beberapa aspek memiliki orientasi laba, sektor ini sering kali memprioritaskan kepentingan sosial. Apabila tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat, maka sektor publik dikategorikan sebagai sektor nirlaba, yang memiliki karakteristik berikut:

1. Tidak berorientasi pada keuntungan finansial.
2. Berperan sebagai organisasi yang berfokus pada pelayanan masyarakat.
3. Memiliki batasan yang lebih ketat dalam menetapkan tujuan dan strategi.
2. Mengandalkan pelanggan sebagai sumber utama pendanaan.
3. Dikelola oleh tim yang terdiri dari para ahli.
4. Mematuhi standar akuntabilitas yang berbeda dibandingkan organisasi swasta atau yang berorientasi laba.
5. Manajemen puncak di sektor publik tidak memiliki tingkat insentif keuangan atau tanggung jawab yang sama seperti di sektor swasta.
6. Bertanggung jawab kepada masyarakat dan tunduk pada proses politik.
7. Tradisi pengendalian manajerial di sektor publik cenderung lebih lemah (Parsons, 2005).

### c. Kebijakan Publik

Ketika istilah "politik" dan "publik" digabungkan menjadi "ketertiban umum," istilah ini memiliki makna yang lebih luas dibandingkan jika digunakan secara terpisah. Keselamatan publik merupakan elemen fundamental bagi keberlangsungan suatu negara dan tidak dapat diabaikan. Tanpa adanya kebijakan nasional, suatu negara dapat dianggap gagal karena kehidupan warganya akan diatur oleh individu atau kelompok tertentu yang bertindak secara tirani untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri (Nugroho, 2009: 11).

Kebijakan publik, termasuk tata kelola pemerintahan, berfungsi untuk mengatur hubungan antara negara dan masyarakatnya. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai peran penting keamanan sebagai bagian integral dari sebuah negara. Nugroho (2009) mengungkapkan bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan negaranya. Manajemen tata kelola bertujuan untuk mengarahkan negara menuju nilai-nilai yang lebih luhur. Peran pemerintah tidak hanya sebatas menetapkan arah dan tujuan nasional tetapi juga memperkuat nilai-nilai bangsa melalui kebijakan publik. Inilah inti dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi kenegaraannya. Penjelasan ini dilengkapi dengan ilustrasi yang relevan.



*Gambar 1. 1 Dimensi Tugas Negara*

(Sumber: Nugroho, 2009)

Kekuasaan negara tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekerasan atau paksaan. Tindakan kebijakan diperlukan untuk mendukung hal ini (Parsons, 2005). Sebagai pemegang kewenangan yang sah, negara tidak dapat berfungsi optimal tanpa perumusan dan penerapan strategi nasional. Karena keamanan pada hakikatnya merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh negara, maka keamanan dapat dipahami sebagai keseluruhan daya upaya yang dilakukan oleh badan-badan yang berwenang untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang diinginkan masyarakat yang telah disepakati.

#### **d. Implementasi Kebijakan**

Implementasi merujuk pada pelaksanaan atau penerapan suatu rencana dengan cermat dan rinci. Secara sederhana, implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan atau penerapan keputusan. Browne & Wildavsky, dalam Misdram & Abidin, (2018) menggambarkan implementasi sebagai perluasan dari serangkaian kegiatan yang saling menyesuaikan. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Ashiddiq, (2022) menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, lembaga pemerintah, atau badan swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Mereka juga menambahkan bahwa implementasi sebenarnya mengacu pada kegiatan dan mekanisme sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang direncanakan, berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditentukan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan, yang berarti setiap kegiatan yang dilakukan merupakan upaya serius untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk

mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

Implementasi adalah langkah-langkah yang diambil untuk merealisasikan suatu program hingga tercapainya hasil yang diinginkan. Agustino, (2006) dalam bukunya *Fundamentals of Public Policy* menjelaskan bahwa implementasi adalah proses dinamis di mana pelaksana kebijakan melakukan kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam *Implementation and Public Policy* mendefinisikan kebijakan sebagai implementasi keputusan politik utama, yang biasanya berupa undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah eksekutif atau keputusan pengadilan yang signifikan. Kebijakan biasanya berfungsi untuk mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, dan menentukan cara untuk mengelola proses implementasi.

Mazmanian & Sabatier, (1983) dalam bukunya *Implementation and Publik Policy* menjelaskan bahwa *implementasi adalah proses dinamis di mana pelaksana kebijakan melakukan kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Implementation and Public Policy mendefinisikan kebijakan sebagai implementasi keputusan politik utama, yang biasanya berupa undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah eksekutif atau keputusan pengadilan yang signifikan. Kebijakan biasanya berfungsi untuk mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, dan menentukan cara untuk mengelola proses implementasi.*

Menurut Carl Friedrich dalam Yosua T. Panggulu, (2013)

kebijakan adalah suatu proses yang melibatkan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini berfokus pada mengatasi hambatan yang ada dan mencari cara agar individu, kelompok, atau pemerintah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam kondisi yang ada. Teori ini juga mengkaji bagaimana regulasi yang kuat dan tata kelola yang efektif dapat mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah berperan penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan industri pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan.

Menurut Ketua J.O. Udoji dalam penelitian Wardana et al., (2021) implementasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada penyusunan kebijakan itu sendiri. Jika langkah-langkah kebijakan tidak dilaksanakan, kebijakan tersebut hanya akan tetap menjadi impian atau rencana baik yang tidak terealisasi dan tersimpan di arsip. Berdasarkan berbagai definisi yang ada, implementasi kebijakan terdiri dari tiga komponen utama: pertama, tujuan kebijakan, kedua, langkah-langkah atau kegiatan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut, dan ketiga, hasil yang tercapai dari kegiatan yang dilakukan.

Nugroho (2023) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sarana untuk mencapai tujuan kebijakan lebih lanjut tanpa menambah atau mengurangi tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan implementasi adalah untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diprogramkan. Meter dan Horn dalam (Subarsono, 2012) mengembangkan model sistem kebijakan yang mencakup beberapa komponen penting yang perlu ada untuk memastikan bahwa tuntutan kebijakan dapat diwujudkan menjadi hasil yang efektif. Ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kriteria dan Tujuan Kebijakan: Menetapkan tujuan kebijakan secara rinci dalam dokumen regulasi dan menentukan kriteria yang jelas dan spesifik untuk mengevaluasi kinerja program.
2. Sumber Daya: Selain mencakup standar target, juga memperhatikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi, seperti pendanaan dan insentif lainnya untuk memperlancar proses implementasi.
3. Karakteristik Lembaga Pelaksana: Faktor-faktor organisasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program, seperti kapasitas sumber daya manusia, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan lembaga, serta kepentingan eksternal.
4. Kegiatan Komunikasi dan Implementasi Antar Organisasi: Implementasi memerlukan prosedur dan mekanisme kelembagaan yang mengatur pola komunikasi antar organisasi dari tingkat kewenangan tertinggi hingga yang terendah.
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik: Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program, seperti sumber daya ekonomi organisasi pelaksana, opini publik, dukungan elit, peran kelompok kepentingan dan sektor swasta.
6. Kecenderungan Sikap Pelaksana: Persepsi pelaksana terhadap program dalam organisasi dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap kebijakan, seperti penolakan, netralitas, atau penerimaan, yang didasari oleh nilai-nilai pribadi, loyalitas, dan kepentingan pribadi. Standar kebijaksanaan dan tujuan: yaitu rincian tujuan keputusan kebijaksanaan secara

menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.

Menurut Nugroho, (2023:158) implementasi kebijakan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan kebijakan secara tepat, tidak berlebihan maupun kekurangan. Nugroho, (2023:158) juga menekankan bahwa perencanaan dan kebijakan yang baik memainkan peranan penting dalam mencapai hasil yang optimal. Konsep yang didasarkan pada data dan informasi yang berorientasi masa depan memberikan kontribusi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan, sementara sekitar 40 persen berhubungan dengan implementasinya. Namun, implementasi tersebut harus tetap konsisten dengan konsep yang telah dikembangkan.

Dalam bukunya *Analisis Kebijakan Publik* (Subarsono, 2012) mengemukakan bahwa teori implementasi kebijakan mencakup hal-hal berikut:

1. Teori Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2012) menyatakan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :
  - a. Tolok Ukur dan Tujuan Kebijakan: Tolok ukur dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur agar dapat tercapai. Jika tidak, dapat timbul perbedaan interpretasi dan konflik di antara pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
  - b. Sumber Daya: Implementasi kebijakan memerlukan dukungan baik sumber daya manusia maupun non-manusia agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
  - c. Hubungan Antar-Organisasi: Banyak program yang membutuhkan dukungan serta koordinasi antar lembaga untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu,

koordinasi dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan program.

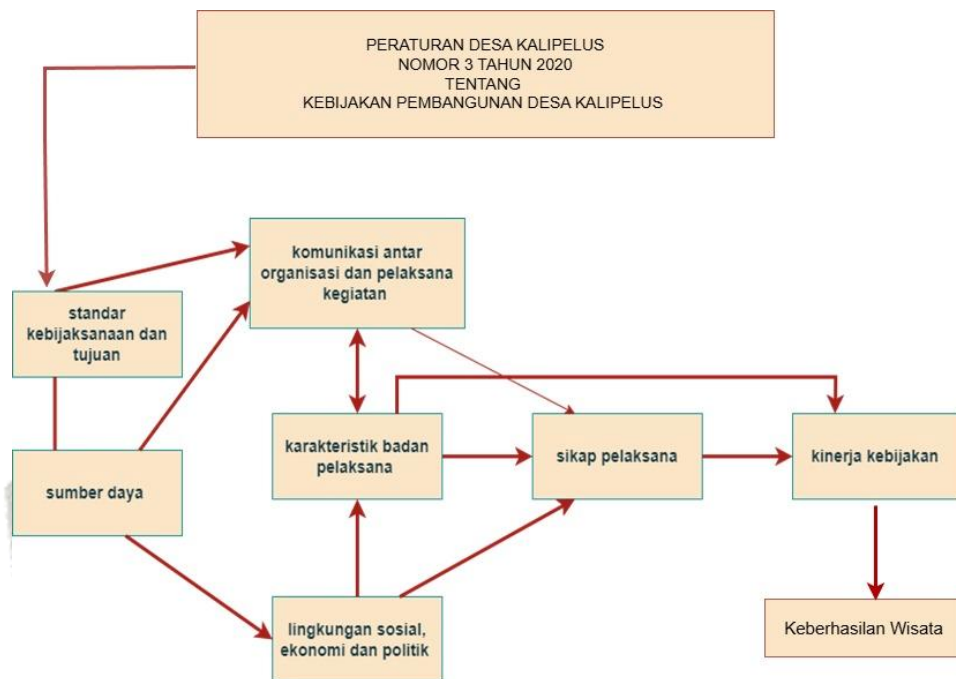
- d. Karakteristik Agen Implementasi: Karakteristik agen pelaksana, seperti struktur birokrasi, norma, dan hubungan internal birokrasi, sangat memengaruhi efektivitas implementasi program.
- e. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi: Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi dan kondisi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, dukungan kelompok kepentingan, opini publik, dan sikap elit politik terhadap kebijakan juga sangat memengaruhi.
- f. Sikap Pelaksana: Sikap pelaksana mencakup tiga elemen utama: a) respons pelaksana terhadap kebijakan, yang mempengaruhi kesediaan mereka untuk melaksanakan kebijakan; b) pengetahuan mengenai kebijakan; dan c) kecenderungan nilai serta preferensi pelaksana yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan.

Karena adanya berbagai teori dalam implementasi kebijakan pemerintah, pemilihan teori yang tepat sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang ada. Oleh karena itu, teori yang dipilih harus dapat memenuhi kebutuhan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, yang lebih penting adalah efektivitas kebijakan itu sendiri, yang harus dibuktikan melalui implementasinya.

## **G. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional adalah penjelasan penjelasan rinci dan spesifik tentang bagaimana suatu konsep atau fenomena dipahami, diidentifikasi, dan diukur berdasarkan konteks penelitian. Pada penelitian kualitatif, cenderung menggunakan istilah "indikator" untuk mendeskripsikan elemen-elemen atau tanda-tanda yang mencerminkan fenomena yang sedang diteliti. Suatu indikator akan diukur atau diidentifikasi dalam

sebuah penelitian atau proyek. Definisi ini memastikan bahwa konsep abstrak dapat dipahami dan diukur dengan cara yang konsisten dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Definisi operasional berfungsi untuk menjelaskan secara spesifik langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengukur atau mengidentifikasi indikator tersebut (Zamrodah, 2016).



**a. Standar, Sasaran Kebijakan atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Standar dalam konteks ini adalah kriteria atau pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah desa Kalipelus untuk menentukan kualitas dan efektivitas dari strategi yang diterapkan guna meraih nominasi Wisata Nusantara. Sasaran kebijakan atau ukuran adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh pemerintah desa Kalipelus dalam upaya mereka meraih nominasi Wisata Nusantara. Sasaran kebijakan ini dapat berupa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata, pelestarian budaya lokal, dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata. Ukuran ini dapat dioperasionalkan melalui data statistik kunjungan wisatawan, laporan keuangan desa, dan survei kepuasan wisatawan. Tujuan kebijakan ini mencakup pengembangan desa Kalipelus sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan dan terkenal secara nasional. Ini juga melibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pelestarian lingkungan, dan penguatan identitas budaya. Pengukuran

tujuan kebijakan dapat dilakukan melalui evaluasi dampak sosial-ekonomi, survei kepuasan penduduk lokal, dan penilaian keberlanjutan lingkungan.

**b. Sumber Daya**

Sumber daya dalam hal ini ada dua yaitu sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Individu atau kelompok yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di desa Kalipelus, termasuk pegawai pemerintah desa, dan komunitas local. Potensi alam yang dimiliki oleh desa Kalipelus yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata, termasuk keindahan alam, dan keanekaragaman hayati. Adapun sumber daya finansial, dana atau anggaran yang tersedia untuk pengembangan dan promosi pariwisata, termasuk dana desa, investasi



dari pihak swasta, dan bantuan pemerintah pusat atau daerah. Dan juga ada sumber daya teknologi, teknologi infrastruktur yang digunakan untuk mendukung pengelolaan dan promosi pariwisata, termasuk teknologi informasi dan fasilitas pendukung.

**c. Karakteristik Organisasi**

Karakteristik organisasi dalam konteks strategi keberhasilan pemerintah desa Kalipelus meraih nominasi Wisata Nusantara adalah atribut atau ciri khas yang dimiliki oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga terkait yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas mereka dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata. Karakteristik ini mencakup struktur organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan, dan komunikasi.

**d. Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan – kegiatan pelaksanaan**

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dalam konteks strategi keberhasilan pemerintah desa Kalipelus meraih nominasi Wisata Nusantara merujuk pada interaksi, koordinasi, dan kolaborasi antara berbagai organisasi dan pihak yang terlibat dalam upaya pengembangan pariwisata di desa tersebut. Ini mencakup proses pertukaran informasi, penyelarasan tujuan, dan pelaksanaan program-program yang mendukung tercapainya nominasi Wisata Nusantara. Proses pertukaran informasi, diskusi, dan koordinasi antara pemerintah desa Kalipelus dengan organisasi-organisasi lain yang berperan dalam pengembangan pariwisata, termasuk lembaga pemerintah daerah, komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Berbagai program, proyek, dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Kalipelus dan organisasi terkait untuk mengembangkan pariwisata dan mendukung pencapaian nominasi Wisata Nusantara.

**e. Disposisi atau sikap para pelaksana**

Disposisi atau sikap para pelaksana dalam konteks strategi keberhasilan pemerintah desa Kalipelus meraih nominasi Wisata Nusantara adalah persepsi, nilai, dan orientasi para individu yang terlibat dalam implementasi strategi pariwisata. Ini mencakup komitmen,

motivasi, dan pandangan mereka terhadap tugas yang dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai. Dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhi semangat dan keinginan para pelaksana untuk bekerja dan mencapai tujuan pariwisata desa.

**f. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan politik**

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam konteks strategi keberhasilan pemerintah desa Kalipelus meraih nominasi Wisata Nusantara adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dan membentuk dinamika serta keberhasilan pengembangan pariwisata di desa tersebut. Ini mencakup aspek-aspek seperti kesejahteraan sosial, situasi ekonomi lokal, dan stabilitas politik yang berdampak pada implementasi strategi pariwisata. Aspek-aspek yang terkait dengan struktur sosial, budaya, dan interaksi masyarakat desa Kalipelus yang mempengaruhi penerimaan dan partisipasi dalam pengembangan pariwisata. Situasi ekonomi desa Kalipelus yang mencakup pendapatan, lapangan pekerjaan, dan struktur ekonomi lokal yang mendukung atau menghambat pengembangan pariwisata. Stabilitas dan kebijakan politik di desa Kalipelus yang mempengaruhi implementasi dan keberlanjutan strategi pariwisata.

**g. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur**

Perencanaan pembangunan infrastruktur dalam konteks strategi keberhasilan pemerintah desa Kalipelus meraih nominasi Wisata Nusantara adalah proses sistematis untuk menentukan kebutuhan, desain, dan implementasi fasilitas fisik yang mendukung pengembangan pariwisata di desa tersebut. Ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memenuhi kebutuhan wisatawan, masyarakat lokal, dan standar industri pariwisata. Proses penentuan jenis dan jumlah fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pariwisata di desa Kalipelus. Proses perencanaan teknis dan estetis untuk pembangunan fasilitas pariwisata, termasuk pertimbangan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan estetika, yang terakhir yaitu tahap implementasi dari rencana pembangunan infrastruktur, termasuk konstruksi, pengawasan, dan penyelesaian proyek.

## **H. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menginvestigasi kondisi alami objek yang diteliti. Pengumpulan data akan dilakukan melalui triangulasi, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan fokus pada pemahaman yang mendalam ketimbang generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, tujuan analisis data adalah untuk mengembangkan hipotesis, sementara pada penelitian kuantitatif, analisis bertujuan untuk menguji hipotesis. Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan menjadi dasar dalam proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., 2017). Menurut Creswell (2022), studi kasus melibatkan pengumpulan data secara menyeluruh karena peneliti berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kasus tersebut. Oleh karena itu, analisis yang tepat sangat diperlukan untuk menyusun gambaran yang rinci mengenai kasus yang ditemukan (Assyakurrohim et al., 2022).

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa untuk mengembangkan Wisata Pantai Pangasan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kali Pelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Penelitian dilakukan di Pantai Pangasan, tepatnya di area pantai yang terletak berdekatan dengan persawahan di Dusun Batulapak.

### **3. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Data Primer**

Data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumber asli di lokasi penelitian atau dari subjek yang diteliti. Data ini dikumpulkan dari individu yang relevan dan mampu memberikan informasi langsung terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dari Direktur Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Pantai Pangasan, Desa Kalipelus,

Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup informasi terkait desa. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak ketiga, seperti laporan, artikel, dan sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Data sekunder akan diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, berita, dan sumber lainnya yang relevan yang dapat mendukung penelitian ini.

#### **4. Teknik Penentuan Informan**

Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang terlibat langsung dalam penelitian dan memberikan informasi berdasarkan pemahaman mereka terhadap topik yang sedang diteliti. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Menurut Haris (2015), metode ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitian untuk memastikan relevansi yang lebih tinggi. Dalam pendekatan ini, hanya sumber data yang dianggap berhubungan erat dengan topik penelitian yang dipertimbangkan, dan informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Peneliti memilih informan yang diperkirakan memiliki keterlibatan yang signifikan dan langsung dalam pengembangan desa wisata. Informan penelitian ini adalah:

Tabel 1. 1 Daftar Nama Informan

| No | Nama                                                  | Alasan                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Kepala Desa Kali Pelus                                | Selaku Kepala Desa Kalipelus                                 |
| 2  | Ketua Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Desa Kali Pelus | Memahami wisata dan mengetahui seluk beluk pendanaan         |
| 3  | Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)               | Memahami pembentukan atau Pembangunan Wisata Pantai Pangasan |
| 4  | Kaur Perencanaan Pembangunan                          | Memahami Proses atau perencanaan Pembangunan wisata          |

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan informasi dengan cara mengamati dan mencatat fenomena yang diamati secara sistematis. Teknik ini digunakan ketika penelitian berfokus pada perilaku manusia atau proses kerja, serta melibatkan sedikit responden. Observasi dipahami sebagai "pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti." Proses observasi dilakukan melalui penyelidikan yang teliti dan terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode observasi sistematis (Pujaastwa, 2016). Tujuan observasi adalah untuk memperoleh informasi yang langsung dan akurat. Proses ini melibatkan perhatian terhadap peristiwa yang terjadi, mendengarkan informan, mengumpulkan data yang relevan, serta memeriksa dokumentasi yang tersedia.

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti bertemu langsung dengan responden untuk mengumpulkan informasi secara lisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan penelitian (Pujaastwa, 2016). Wawancara terstruktur mengharuskan peneliti untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan. Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti harus dapat mengembangkan keterampilan untuk menggali informasi lebih dalam dari informan.

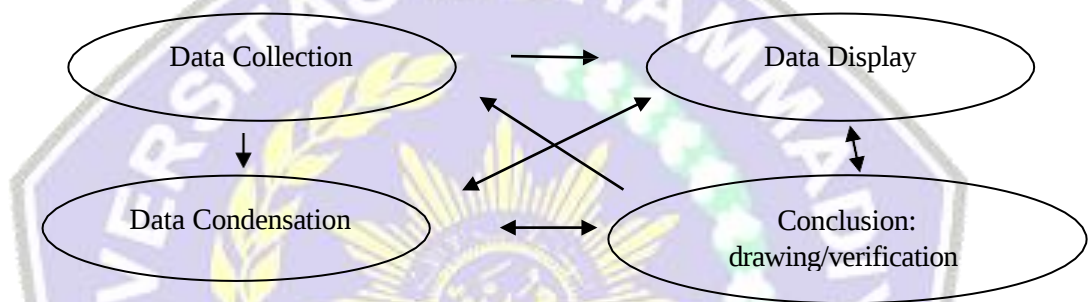
### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang berbentuk buku, arsip, dokumen, gambar tertulis, foto, dan laporan yang mendukung penelitian. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi berfungsi untuk melengkapi metode observasi dan wawancara. Temuan yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara menjadi lebih dapat dipercaya dan kredibel jika didukung dengan foto atau literatur ilmiah

yang relevan. Namun, tidak semua dokumen memenuhi kriteria ini, karena beberapa gambar dibuat dengan tujuan tertentu dan tidak selalu mencerminkan kondisi nyata. Temuan dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika didukung dengan dokumentasi (Sudarsono, 2017).

#### d. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam artikel ini mengacu pada (Miles, Matthew, Huberman, Michael, 2014). Dalam analisis data kualitatif, terdapat tiga aktivitas utama yang dilakukan secara bersamaan: *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*



Gambar 1. 2 Analisis Data Kualitatif

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013, 246)

##### 1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Dalam Pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait tentang implementasi kebijakan tata kelola pantai pangasan di desa Kalipelus. Untuk mendukung metode kualitatif yang mencakup data tentang implementasi kebijakan tata kelola wisata pantai pangasan di desa Kalipelus .

##### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penyajian data penulis menyajikan data terkait kebijakan tata kelola wisata pantai pangasan, dari pernyataan di atas untuk mendukung metode kualitatif sebagaimana metode tersebut dengan menggunakan teknik wawancara dengan mengambil data yang ada di lapangan.

### 3. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, pengabstraksian, dan penyusutan data untuk mendekati kelengkapan catatan lapangan yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen, serta sumber empiris lainnya, dan/atau mengonversi data menjadi bentuk yang lebih ringkas, mudah dipahami, dan lebih mudah diakses.

### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion: drawing/verification*)

Proses untuk menarik dan mengonfirmasi kesimpulan sangat krusial. Sejak awal pengumpulan data, analisis kualitatif berusaha mencari makna, mencatat pola dalam penjelasan, kemungkinan struktur yang konsisten, hubungan sebab-akibat, dan pernyataan yang diajukan. Pada tahap ini, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kesimpulan ditarik untuk menentukan apakah data yang diperoleh relevan dan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

## 6. Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memeriksa dan memastikan validitas dengan menganalisis data dari beragam perspektif. Dalam konteks penelitian kualitatif, validitas berkaitan dengan seberapa akurat temuan menggambarkan situasi yang diteliti dan apakah temuan tersebut didukung oleh bukti yang kuat. Fauziah Nur R (2015) menyatakan bahwa triangulasi merujuk pada penggunaan berbagai metode untuk mempelajari fenomena dari sudut pandang yang berbeda. Terdapat empat jenis triangulasi: 1) triangulasi metode, 2) triangulasi antar- peneliti (ketika penelitian dilakukan dalam kelompok), 3) triangulasi sumber data, dan 4) triangulasi teori.

Triangulasi metodologis dilakukan dengan membandingkan informasi atau data melalui berbagai metode. Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang obyektif dan jelas mengenai suatu topik, observasi dan wawancara dapat digunakan untuk

memverifikasi data yang diperoleh. Selain itu, berbagai jenis informasi dapat dimanfaatkan untuk menilai validitas data yang diterima. Prosedur triangulasi ini diterapkan saat menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari partisipan dan informan untuk memastikan keabsahannya. Triangulasi metodologis melibatkan penggunaan metode yang sama dalam berbagai situasi dan penerapan metode yang berbeda untuk menghubungkan objek yang sama (Zamili, 2015).

- a. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data atau informasi yang diperoleh melalui berbagai metode. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya tentang topik yang diteliti, wawancara dan observasi dapat digunakan untuk memverifikasi keabsahan informasi. Selain itu, melibatkan banyak informan dapat membantu memastikan validitas data yang dikumpulkan. Teknik triangulasi ini diterapkan ketika terdapat keraguan terhadap akurasi data atau informasi yang diperoleh dari peserta atau informan penelitian.
- b. Melibatkan berbagai pihak dalam proses pengumpulan dan analisis data menciptakan interaksi antara peneliti. Tujuan teknik ini adalah untuk memperluas pengetahuan mengenai informasi yang diperoleh dari subjek penelitian. Namun, untuk mencegah munculnya bias baru yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, orang-orang yang terlibat dalam penelitian harus memiliki pengalaman dalam bidang penelitian dan tidak memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan.
- c. Triangulasi data adalah metode yang menggunakan berbagai teknik dan sumber data untuk memverifikasi kebenaran informasi. Selain wawancara dan observasi, peneliti juga dapat menggunakan teknik lain seperti observasi partisipan, dokumen, arsip, catatan sejarah, berkas resmi, tulisan pribadi, foto, dan gambar. Masing-masing teknik ini memberikan bukti

dan pandangan yang berbeda, yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti.

- d. Triangulasi teori. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan informasi atau tesis yang kemudian dibandingkan dengan perspektif teoritis yang relevan untuk menghindari bias pribadi dalam penemuan dan kesimpulan peneliti. Selain itu, triangulasi teori memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi wawasan teoritis yang lebih dalam mengenai hasil analisis data, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi yang mencakup triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dapat diverifikasi untuk mencapai kesimpulan yang lebih sahih. Kombinasi triangulasi ini diterapkan bersamaan dengan kegiatan lapangan untuk memastikan pengumpulan data yang komprehensif. Oleh karena itu, data yang terkumpul diharapkan dapat digunakan dalam proses penarikan kesimpulan (Marives et al., 2020).